BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang telah menjadi kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan, dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan - pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin modernnya kehidupan manusia, dewasa ini pemerintah banyak mendapat sorotan publik terutama dalam hal pelayanan yang menuntut aparatur negara sebagai pelayan masyarakat memberikan pelayanan sebaik – baiknya menuju *good governance*, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri semakin kritis dalam menginginkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Oleh sebab itu, substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan.

Berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan, maka penyediaan pelayanan oleh pemerintah itu sendiri harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, aparat pemerintah sangatlah bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai wujud dari

penciptaan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang efektif dan terbaik oleh pemerintah karena system demokrasi yang ada juga kembali pada rakyatnya, selain itu karena masyarakat juga telah memberikan dananya dalam bentuk pungutan pajak, retribusi serta berbagai pungutan yang lainnya Namun saat ini, pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Artinya, birokrat harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas yang menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan rencana maka hal itu dikatakan tidak efektif. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat

Selain itu, efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi agar dapat memuaskan masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kata efektivitas itu sendiri, memiliki unsur- unsur yang menjadi

perhatian kepada masyarakat. Mereka menuntut pelayanan yang efektif dalam berbagai hal, yakni dalam penyelesaian pekerjaan secara efektif berarti menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan kuantitasnya serta penggunaan sumber daya ataupun output yang minimal dalam mencapai hasil kerja yang maksimal. Hal ini selalu diharapkan tidak hanya di pusat swasta, tetapi juga pada semua tingkat pemerintahan baik itu dari pusat sampai kelurahan mendapatkan tuntutan yang sama dari publik yaitu pelayanan yang efektif.

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, yang menjadi sasaran pembangunan adalah masyarakat bangsa. Salah satu instrumen pembangunan yang merupakan hak khusus yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat adalah layanan publik. Masyarakat berhak atas berbagai layanan yang harus diberikan oleh pemerintah karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, atau dengan kata lain pemerintah berkewajiban penuh untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain. Pelayanan dalam sektor administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang paling banyak permintaannya. Salah satu rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan yaitu proses pencatatan sipil.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil merupakan pencatatan peristiwa penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan terkait urusan kependudukan yaitu pengurusan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Nikah, Akte Cerai, Akte Kematian, Keterangan Pindah Penduduk dan lain sebagainya

Data mengenai diri seseorang begitu penting sehingga segala macam proses pendataan pada setiap orang/individu baik satusnya sebagai pribadi maupun dalam lingkungan masyarakat harus jelas dan benar adanya. Proses pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dinyatakan pada UU Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga serta identitas anggota keluarga. Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kepala desa/lurah dan camat. Pelaporan tersebut sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK). Pengurusan Kartu Keluarga (KK) sangat penting, karena setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) sebagai data kependudukan. Kepemilikan Kartu Keluarga dapat diurus mempergunakan jalur-jalur birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Secara prinsipnya, Kartu Keluarga memang hanya sebuah catatan administratif, meski begitu fungsi Kartu Keluarga (KK) ini sangat penting dan bermanfaat karena data yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dapat digunakan sebagai bukti jati diri hubungan seseorang dengan keluarganya. Kartu Keluarga (KK) sangat dibutuhkan oleh setiap individu dalam kepengurusan berbagai hal mengenai kependudukan seperti paspor, KTP, akta kelahiran, pendaftaran sekolah, pengurusan beasiswa dan pelayanan masyarakat lainnya.

Kartu Keluarga adalah sebuah surat administrasi kependudukan berisi data-data keluarga yang meliputi nama anggota keluarga, nomor identitas kependudukan, jenis kelamin, agama, status perkawinan, hubungan keluarga, jenis pekerjaan dan beberapa data umum lain. Berikut ini data mengenai Penerbitan Kartu Keluarga pada Kecamatan Coblong Kota Bandung :

Tabel 1.1

Angka Penerbitan Kartu Keluarga di Kecamatan Coblong 2018-2020

Tahun	Pengeluaran Blanko	Rusak
2018	**5.212**	**465**
2019	**7.128**	**667**
2020	**15.420**	**1006**

Sumber: Kecamatan Coblong Kota Bandung (2021)

Berdasarkan data yang diperoleh selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa angka penerbitan dokumen Kartu Keluarga (KK) Kecamatan Coblong masih tergolong rendah. Pada tahun 2018, terdapat 5.212blanko yang dikeluarkan untuk penerbitan Kartu Keluarga

(KK) dan 465 surat Kartu Keluarga (KK) yang rusak, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 7.128 blanko yang dikeluarkan untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK). Sehingga, jumlah blanko yang dikeluarkan untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2019 Meningkat serta surat Kartu Keluarga (KK) yang rusak juga semakin bertambah yaitu 667 surat Kartu Keluarga (KK), bila dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 mengalami kerusakan yang cukup fatal yaitu terdapat 1006 surat Kartu Keluarga (KK) yang rusak, meskipun pertambahan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dari tahun ke tahun terus meningkat. Kerusakan dalam Penerbitan kartu keluarga disebabkan oleh karena adanya perubahan data yang terjadi karena peristiwa kelahiran, kematian, kepindahan, dan lain – lain serta juga kesalahan pencetakan, sehingga perlu adanya perbaikan atau Penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang baru.

masalah lain yang peneliti temukan pada saat datang ke lokasi yaitu mengenai fasilitas penunjang yaitu jaringan akses internet yang kurang optimal. Karena Jaringan internet adalah salah satu alat pendukung yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung sebagai alat untuk pendukung pelayanan, hanya saja koneksi internet yang tidak stabil pada saat melakukan pelayanan, mengakibatkan data pelayanan yang sudah dibuat menjadi terhambat proses pengiriman data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung untuk penerbitan kartu keluarga baru. Hal tersebut terjadi karena semua pelayanan dan aparatur di kecamatan menggukan jaringan internet tersebut dimana dalam kecamatan tersebut terdapat 25 (dua puluh) unit kompeter yang menggunakan jaringan internet tersebut sehingga dalam mengimput data menjadi tidak stabil.

Hal tersebut membuat pelayanan tidak berjalan dengan baik karena untuk mengimput data selalu menggukan jaringan internet sama halnya dalam pengiriman berkas ke Disdukcapil Kota Bandung juga menggunakan jaringan internet karena hal tersebut terjadi maka pelayanan menjadi terhambat di tambah lagi dalam jadwal pengiriman data pelayanan ke Disdukcapil dalam 1 minggu hanya satu kali dan kalau jaringan internya yang tidak stabil sehingga tidak dapat mengirim data maka hal tersebut dapat menjadi masalah dalam pelayanan.

Pembutan Kartu Keluarga (KK) merupakan hal yang paling utama dan penting bagi masyarakat, karena bagian dari tanda atau identitas seseorang sehingga membuat banyak masyarakat yang melakukan pelayanan Penerbitan kartu keluarga tersebut untuk kepentingan yang bersangkutan dengan kehidupannya misalnya membuat jaminan asuransi kesehatan menggunakan data kartu keluarga (KK).

Terdapat penelitian terdahulu mengenai Penerbitan Kartu Keluarga, yang pertama dengan judul "Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja" yang diteliti oleh Katrina (2017). Dalam penelitiannya Katrina (2017) menjelaskan terkait efektivitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, seperti tidak adanya kepastian waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, antrian yang tidak tertib, adanya perilaku diskriminatif dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan masih ditemukannya sejumlah kesalahan dalam Penerbitan Kartu Keluarga sehingga membutuhkan waktu lagi untuk memperbaikinya. Hal – hal saperti inilah

yang sering kali menjadi kendala yang ditemukan dalam proses Penerbitan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja. dalam penelitiannya juga Katrina (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hari Lubis dan Martani Huseini yakni prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja serta teori yang dikemukakan oleh Siagian yakni kecermatan dan gaya pemberian pelayanan berada pada tataran yang efektif namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu untuk diperbaiki.

Penelitian yang kedua dengan judul "Efektifitas Peelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatn Sipil Kabupaten Bandung Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" Yoga Wiratman (2018), dalam penelitiannya Yoga Wiratman (2018) menjelaskan terkait efektivitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, seperti tidak adanya kepastian waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, antrian yang tidak tertib, adanya perilaku diskriminatif dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan masih ditemukannya sejumlah kesalahan dalam Penerbitan Kartu Keluarga sehingga membutuhkan waktu lagi untuk memperbaikinya. Hal – hal saperti inilah yang sering kali menjadi kendala yang ditemukan dalam proses Penerbitan Kartu Keluarga pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran efektivitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. dalam penelitiannya juga Yoga Wiratman (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian yang ketiga dengan judul "Efektivitas Pelayanan Pemerintah dalam Penerbitan KTP dan Kartu Keluarga di Kelurahan Cipadung Kota Bandung" yang diteliti oleh Ryan Kurniawan Maryanto (2016), dalam penelitiannya Ryan Kurniawan Maryanto (2016) menjelaskan Eksistensi efektifitas pelayanan publik ini diasumsikan karena pengaruh tingkat disiplin kerja aparat pemerintah, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya implikasi disiplin kerja aparat pemerintah terhadap efektifitasnya pelayanan umum, khususnya di Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe. dalam penelitiannya juga Ryan Kurniawan Maryanto (2016) menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, dengan tujuan dapat menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Pelayanan Pemerintah dalam Penerbitan KTP dan Kartu Keluarga di Kelurahan Cipadung Kota Bandung.

Penelitian yang keempat dengan judul "Pengaruh Efektivitas Kuliah Online Dalam Website www.unikom.ac.id Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Unikom" yang diteliti oleh Adibowo Dan Tatik Fidowaty, Rino (2014) dalam penelitiannya Adibowo Dan Tatik Fidowaty, Rino (2014) menjelaskan pelaksanaan kuliah online yang belum efektif karena tidak semua mahasiswa berpartisipasi mengakses kuliah online tersebut. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana

pendukung kuliah online belum maksimal. Sarana dan prasarana tersebut antara lain ketersediaannya akses komputer di kampus belum sesuai dengan jumlah mahasiswa Unikom, tidak semua mahasiswa memiliki komputer/laptop secara pribadi, tidak semua mahasiswa berlangganan akses internet, dan beberapa diantaranya memiliki keterbatasan secara financial.Berdasarkan latar belakang penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan hipotesis seberapa besar pengaruh efektifitas kuliah online dalam website www.unikom.ac.id terhadap prestasi akademik. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Gibson dkk (1995) tentang efektivitas kuliah online (x) dan teori yang di kemukakan oleh Rola (2006) tentang prestasi akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh efektifitas kuliah online dalam website www.unikom.ac.id terhadap prestasi akademik mahasiswa Unikom termasuk dalam kategori lemah hanya sebesar 10,24 %, sedangkan sisanya 89,76 dipengaruhi oleh faktor lain di luar kuliah online. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas kuliah online seyogyanya kuliah online melalui website www.unikom.co.id mampu menjadi alternatif untuk memaksimalkan kualitas dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga besarnya jaringan internet harus di tambahkan serta komputer di kampus harus di perbanyak.

Kesamaan penelitian peneliti dengan penelitian pertama adalah sama-sama meneliti mengenai efektivitas pelayanan Penerbitan kartu keluarga , akan tetapi ada perbedaan lokasi penelitian dan proses melakukan penelitianya Katrina melakukan

penelitian dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif.

Kesamaan peneliti dengan penelitian kedua adalah sama-sama meneliti tentang efektifitas pelayanan Penerbitan kartu keluarga, akan tetapi ada perbedaan lokasi penelitian dan proses melakukan penelitianya Yoga Wiratman menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif.

Kesamaan peneliti dengan penelitian ketiga adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas pelayanan, akan tetapi ada perbedaan Ryan Kurniawan Maryanto meneliti tentang efektivitas pelayanan KTP dan kartu keluarga sedangkan peneliti hanya meneliti efektivitas pelayanan kartu keluarga saja dan serta ada perbedaan lokasi penelitian Ryan Kurniawan Maryanto dengan peneliti.

Kesamaan peneliti dengan penelitian keempat adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas pelayanan, akan tetapi ada perbedaan Adibowo Dan Tatik Fidowaty, Rino (2014) meneliti tentang efektivitas pelayanan pelaksanaan kuliah online di website kuliah online di Unikom sedangkan peneliti meneliti tentang efektivitas pelayanan kartu keluarga di kantor kecamatan coblong Kota Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga di kantor kecamatan Kota Bandung, memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang jika dilihat dari topik penelitian adalah topik yang sama yaitu kartu keluarga, akan tetapi peneliti memiliki perbedaan dalam penelitian yaitu peneliti lebih menekankan kepada bagaimana efektivitas pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan coblong Kota Bandung terkait

Penerbitan Kartu Keluarga yang proses pelayanan Penerbitannya dilihat dari 4 aspek prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, dimana dalam prosesnya peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan coblong dalam Penerbitan Kartu Keluarga.

Efektivitas Pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan dari pemerintah kota Bandung melalui kantor kecamatan coblong Kota Bandung tentunya terus berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat akan tetapi dalam proses pemberian pelayanan Penerbitan kartu keluarga itu sendiri belum bisa dikatakan sudah optimal dikarenakan masih terdapat masalah-masalah terkait dengan pelayanan Penerbitan kartu keluarga di kantor kecamatan kota bandung itu sendiri Beberapa diantaranya yaitu tingkat kerusakan blanko kartu keluarga yang tiap tahun meningkat serta jaringan internet kurang memadai yang mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga di kantor Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tetarik meneliti mengenai efektivitas Pelayanan dengan judul : “Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Pada Kecamatan Coblong Kota Bandung.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada kantor kacamatan coblong dalam aspek prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja di kantor kecamatan coblong Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas, maka maksud yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) di kantor kecamatan coblong Kota Bandung. Sedangkan tujuan dari peneltian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga dalam aspek prosedur pelayanan di kantor kecamatan coblong Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga dalam aspek sarana dan prasarana di kantor kecamatan coblong Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga dalam aspek semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja di kantor kecamatan coblong Kota Bandung.

1,4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta dapat memperkaya bidang ilmu pengetahuan terutama pada kajian evaluasi pembangunan Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Kartu Keluarga Di kantor kecamatan coblong Kota Bandung dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan kepada peneliti mengenai Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga di kantor kecamatan coblong Kota Bandung.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk bahan informasi mengenai Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga di kantor kecamatan coblong Kota Bandung.

c) Bagi Lembaga

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya mengenai Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga di kantor kecamatan coblong Kota Bandung.

d) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya dibidang yang sama di masa yang akan datang.